

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang jumlah peningkatan penduduknya tinggi, sebagai negara agraris sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Semakin berkurangnya lahan pertanian serta kurangnya minat masyarakat untuk mengolah lahan pertanian menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin maupun pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun. Selain pengangguran, masalah kemiskinan di Indonesia juga menjadi topik yang sering dibahas, berbagai bentuk penyebab, dampak maupun cara untuk mengentaskannya menjadi bahan yang sering diulas. Umumnya tingkat kemiskinan secara ekonomi didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup sebagian besar masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan ataupun papan. Ketidakmampuan pendapatan ini juga berpengaruh terhadap rata-rata standar hidup masyarakat seperti kesehatan maupun pendidikan. Kondisi masyarakat yang tergolong miskin dapat dilihat berdasarkan kemampuan tingkat pendapatan untuk mampu memenuhi standar hidup masyarakat secara umum.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan keseluruhan jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan dengan

jumlah penduduk perempuan dengan presentase jumlah hampir seimbang. Fakta empiris menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan memiliki tingkatan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Saat ini masih banyak perempuan yang belum mampu menunjukkan secara optimal potensi maupun jati dirinya karena masih adanya faktor penghambat seperti keterbatasan keterampilan atau kemiskinan baik secara struktural, kultural maupun alamiah sehingga sering kali perempuan di Indonesia mengalami ketertinggalan (KPPA, 2012).

Ketertinggalan perempuan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam pembangunan terutama dalam aspek ekonomi. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketertinggalan perempuan dalam aspek ekonomi seperti kemiskinan atau kurangnya motivasi maupun keterampilan. Perempuan yang memiliki beban kemiskinan tidak mampu berusaha dalam memenuhi kebutuhan khususnya dalam hal pendidikan maupun kesehatan, sehingga saat ini perempuan harus berusaha secara optimal untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Perempuan dengan beban kemiskinan sulit untuk berpikir secara jernih serta tidak mampu terbuka untuk menata kehidupan masa depan. Berbagai hal yang melatarbelakangi ketertinggalan perempuan seperti halnya permasalahan sikap, budaya pengetahuan dan penerapan. Perempuan yang kurang motivasi juga tidak mampu berusaha walaupun sumberdaya ada pada lingkungannya mendukung. Ada pula perempuan yang ingin bergerak maju namun kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam berusaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamuji (2013) terkait kemiskinan yang dialami perempuan merupakan gambaran rendahnya kualitas hidup perempuan sebagai akibat dari keterbatasan akses maupun kontrol perempuan dalam berbagai sumber daya. Masih kentalnya budaya dalam masyarakat dapat membatasi ruang gerak perempuan yang menyebabkan ketertinggalan perempuan dalam bidang pembangunan. Berbagai permasalahan kaum perempuan dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari kemiskinan yang memiliki pengaruh terhadap kualitas kesehatan yang rendah sehingga mobilitas dan aktivitasnya menjadi rendah baik secara ekonomi dan produktivitasnya.

Peran perempuan menjadi sangat penting dalam mendukung ekonomi keluarga sehingga perlunya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan maupun peningkatan kualitas sumber daya perempuan baik berupa pengetahuan keterampilan maupun etos kerja. Pentingnya mengembangkan kegiatan ekonomi perempuan secara produktif, peningkatan akses sumber daya ekonomi berupa modal, teknologi dan pasar, mengembangkan kelembagaan ekonomi secara mikro, maupun mengembangkan berbagai kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi perempuan.

Demikian pula dengan Islam melalui Al Qur'an yang memberikan arahan yang sangat jelas bagi umat manusia untuk mencari penghidupan didunia yang diperoleh dengan cara yang halal serta dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memperoleh hasil untuk pemenuhan kehidupan

sehari-hari. Disebagian masyarakat, istri atau perempuan yang bekerja maupun menjadi tulang punggung keluarga masih menjadi sesuatu yang dinilai kurang pantas karena sejatinya laki-lakilah yang memiliki tanggungjawab bekerja mencari nafkah untuk memenuhi keidupan sehari-hari keluarganya. Namun, dalam Al Qur'an jelas umat manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan QS. At Taubah Ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Yang artinya:

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, alu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Pada ayat tersebut jelas diterangkan bahwa dalam Islam manusia diperintahkan untuk bekerja, tidak ada pengecualian bagi kaum laki-laki ataupun perempuan. Bekerja merupakan ibadah sebagai usaha untuk memperoleh rezeki yang telah diatur oleh Allah SWT. Bekerja dengan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi keluarga maka Allah SWT menjanjikan pahala untuk mereka yang mau bekerja.

Berdasarkan data perkembangan UMKM di Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020, presentase UMKM yang dikelola oleh perempuan di Indonesia sekitar 60% dengan didominasi oleh sektor kuliner, fashion maupun kerajinan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki

peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Peran perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak hanya berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat namun juga berkontribusi dalam upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta sebagai langkah penyerapan tenaga kerja.

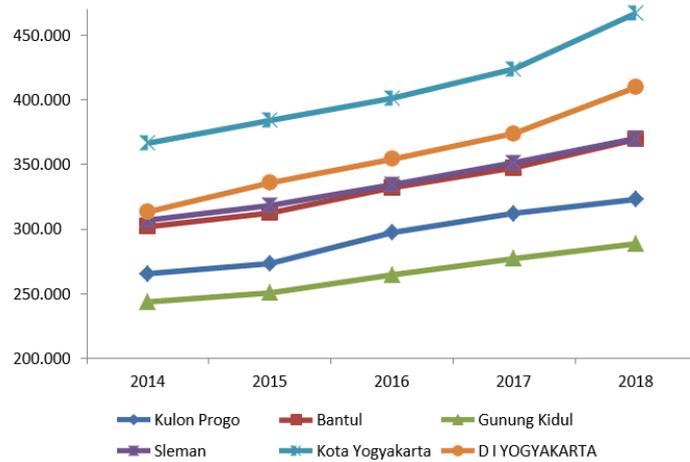
Presentase penduduk miskin menurut Kota/Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016- 2020 berdasarkan tabel berikut:

TABEL 1. 1
Presentase Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

Kabupaten/ Kota	Presentase Angka Kemiskinan Berdasar Kabupaten/Kota (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	20,30	20,03	18,30	17,39	18,01
Gunungkidul	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07
Bantul	14,55	14,07	13,43	12,92	13,50
Sleman	8,21	8,13	7,65	7,41	8,12
Yogyakarta	7,70	7,64	6,98	6,84	7,27

Sumber: BPS DIY, 2020

Berdasarkan tabel diatas, presentase penduduk miskin selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Presentase penduduk miskin terbesar pada Provinsi D.I Yogyakarta terdapat di Kabupaten Kulon Progo dengan penurunan presentase hingga tahun 2019 sebesar 17,39 persen dan kembali meningkat di tahun 2020 sebesar 18,01 persen. Presentase ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo masih terdapat penduduk miskin yang paling banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya.



Sumber: BPS DIY, 2019

GAMBAR 1. 1
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta Tahun
2014-2018 (Rupiah per Kapita perbulan)

Garis Kemiskinan kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 garis kemiskinan kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dengan pergerakan yang landai jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mengalami peningkatan cukup drastis. Garis kemiskinan Kulon Progo pada tahun 2015 sebesar 273.436 rupiah perkapita perbulan, sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 297.353 rupiah perkapita perbulan dengan tingkat lonjakan sebesar 8,75 persen. Masalah kemiskinan memang menjadi momok utama pemerintah yang perlu diperhatikan untuk kemajuan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja pada sektor informal didominasi oleh perempuan dengan presentase yang mencapai 57,35 persen. Pada tahun 2020, jumlah pekerja perempuan pada sektor informal di DIY mengalami kenaikan dengan total pekerja

perempuan sebanyak 604.682 orang. Meskipun jumlahnya mendominasi, namun hingga kini masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh haknya. Seringnya perempuan yang menggantungkan pekerjaan pada usaha buruh seringkali berdampak pada rendahnya upah yang diberikan apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai program seperti program Desa PRIMA.

Program Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri) merupakan langkah pemberdayaan masyarakat desa dengan sasaran kaum perempuan yang bertujuan untuk mampu mewujudkan kemandirian kaum perempuan dalam bidang ekonomi melalui berbagai kegiatan terkait perekonomian secara produktif sehingga mendorong terciptanya kehidupan yang sejahtera. Dengan adanya program Desa PRIMA, perempuan akan terdorong untuk mengembangkan usaha sehingga tercipta produktifitas dan kemandirian ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan terhadap perempuan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan No.58/SK/MENEG.PP/XII/2004 program Desa PRIMA merupakan penerapan dari Kebijakan PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan) terkait dengan Kebijakan dan Strategi PPEP yang mulai terbentuk pada tahun 2008. Keterlibatan perempuan sejatinya memiliki peranan penting baik secara kultural dalam hal rumah tangga maupun sosial masyarakat, perempuan juga memiliki peranan penting dalam

pembangunan. Partisipasi perempuan diyakini memiliki kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menekan angka kemiskinan.

Program Desa PRIMA di Yogyakarta dari tahun 2008 hingga tahun 2021 mencapai 107 Desa yang tergabung di beberapa Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Desa PRIMA yang tumbuh, berkembang dan maju. Program Desa PRIMA memiliki sasaran pada kaum perempuan dari keluarga yang tergolong miskin sehingga dengan adanya program ini dapat menekan angka kemiskinan di berbagai wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan dianggap berpotensi untuk diberikan bantuan program terkait. Program Desa PRIMA di Kabupaten/Kota Yogyakarta beranggotakan kaum perempuan desa yang merupakan binaan dari DP3AP2 (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) D.I Yogyakarta yang diharapkan mampu untuk mengelola dan mendirikan berbagai UMKM sebagai sarana pendukung perekonomian rumah tangga dan mengurangi kemiskinan (Buku Pedoman Desa Prima, 2019).

Pemerintah senantiasa memberikan dukungan terhadap perkembangan UMKM. Melalui program Desa PRIMA pemerintah memberikan modal usaha berupa dana hibah yang kemudian dikelola dalam bentuk simpan pinjam pada setiap desa binaan sehingga dapat membantu produktifitas dan keberlanjutan UMKM dari masing-masing anggota. Modal usaha merupakan faktor utama dalam perkembangan usaha yang

dapat meningkatkan pendapatan usaha, modal usaha sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Namun, sebagian besar UMKM memiliki modal usaha yang terbatas serta sebagian lembaga keuangan perbankan belum mampu menjangkau usaha dari masyarakat kecil dan menengah. Sehingga adanya program Desa PRIMA yang memberikan modal usaha berupa dana hibah yang dikelola oleh masing-masing anggota dirasa mampu untuk mendukung perkembangan UMKM.

Sampai saat ini kelompok Desa PRIMA di Kabupaten Kulon Progo terus berkembang hingga terdapat beberapa kelompok Desa PRIMA yang dikategorikan maju oleh DP3AP2 DIY. Kriteria Desa PRIMA yang tergolong maju dapat dilihat dari perkembangan anggota kelompok maupun kelancaran dari pengelolaan dana hibah berupa dana bergulir yang dijadikan modal tambahan bagi UMKM anggota Desa PRIMA. Berikut daftar Desa PRIMA Maju di Kabupaten Kulon Progo.

TABEL 1. 2
Desa PRIMA Maju di Kabupaten Kulon Progo 2021

No.	Desa PRIMA	Alamat	Tahun Pembentukan	Jumlah Anggota
1.	Tri Manunggal	Hargorejo, Kokap, Kulon Progo	2009	80
2.	Banyuroto	Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo	2010	60
3.	Gotakan	Gotakan, Panjatan, Kulon Progo	2010	36
4.	Tunas Mekar	Tuksono, Sentolo, Kulon Progo	2012	34
5.	Anggrek Bulan	Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo	2014	28
6.	Amrih Makmur	Demangrejo, Sentolo, Kulon Progo	2016	30

Sumber: DP3AP2 Kota Yogyakarta, 2021

Berdasarkan tabel diatas seluruh Desa PRIMA memiliki anggota awal berjumlah 25 orang. Desa PRIMA Tri Manunggal yang terbentuk pada tahun 2009 dengan dana hibah awal yang diperoleh berjumlah Rp.37.000.000,- kini di tahun 2021 anggotanya meningkat menjadi 80 orang dengan total dana hibah yang dikelola mencapai Rp.130.000.000,-. Desa yang terbentuk pada tahun 2010 dengan dana hibah awal yang diperoleh berjumlah Rp.37.000.000,- kini di tahun 2021 anggotanya meningkat menjadi 60 orang dengan total dana hibah yang dikelola mencapai Rp.106.947.000,- pada Desa PRIMA Banyuroto dan 36 anggota dengan dana hibah yang dikelola mencapai Rp.56.000.000,- pada Desa PRIMA Gotakan. Desa PRIMA Tunas Mekar yang terbentuk tahun 2012 memiliki anggota 34 orang dengan total dana hibah sebesar Rp.120.000.000. Anggrek Bulan yang terbentuk pada tahun 2014 memiliki anggota 28 orang dengan total dana hibah yang dikelola sebesar Rp.42.980.000,- sedangkan Desa PRIMA Amrih Mamur yang terbentuk pada tahun 2016 kini memiliki anggota 30 orang dengan besaran dana hibah yang dikelola Rp.48.883.850,-

Modal memang menjadi faktor utama dalam pengembangan usaha, selain itu peningkatan kualitas dan produktifitas manusia terutama perempuan sebagai penggerak UMKM juga sangatlah diperlukan. Hal tersebut sejalan dengan adanya program Desa PRIMA yang mendukung perkembangan UMKM oleh kaum perempuan seperti halnya pelatihan untuk kemajuan keterampilan maupun inovasi bagi pelaku UMKM. Pelatihan yang diberikan dalam program Desa PRIMA dilakukan secara

berkala baik berupa materi maupun praktik untuk memperluas informasi dan pengetahuan yang dapat memperlancar kegiatan usaha serta usahanya dapat memberdayakan warga sekitar.

Tidak hanya pelatihan, program Desa PRIMA juga memberikan pendampingan secara berkala berupa mentoring dan evaluasi terkait perkembangan UMKM berupa jumlah anggota, jumlah usaha maupun dana bergulir. Pendampingan dilakukan pada aspek produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun aspek keuangan anggota. Sering munculnya berbagai hambatan yang ditemui pada keberlangsungan usaha maka pendampingan sangat penting dilakukan untuk mampu memberikan solusi yang lebih terarah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Pendamping dituntut untuk tidak hanya mampu menjadi penggerak perubahan dalam usaha, namun mampu melaksanakan berbagai tanggungjawab secara teknis sesuai dengan berbagai kebutuhan keterampilan dasar baik analisis sosial, kemampuan komunikasi dan negosiasi, pemberian konsultasi maupun dalam hal pengaturan sumber dana yang tepat guna.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa faktor yang berhubungan dengan perkembangan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Khasan Setiaji, (2018) mengenai pengaruh modal usaha dan karakteristik wirausaha terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Jepara dengan metode deskriptif kuantitatif. Melalui analisis regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa pembiayaan modal usaha dan karakteristik wirausaha secara parsial maupun

simultan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan unit usaha UMKM di Kabupaten Jepara.

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Rina Irawati (2018), mengenai pengaruh pelatihan dan pembinaan terhadap perkembangan usaha kecil yang merupakan studi kuantitatif pada UKM Lowokwaru, Malang. Hasil pengujian regresi berganda menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan maupun parsial antara variabel pelatihan dan pembinaan terhadap perkembangan UKM di Lowokwaru.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Fajar Istinganah et al., (2020) yang melakukan penelitian kuantitatif mengenai pengaruh modal usaha, tingkat pendidikan dan karakteristik wirausaha terhadap perkembangan. Melalui regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa variabel modal usaha, pelatihan dan pendampingan secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh terhadap perkembangan UKM di Pedurungan Semarang.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Zaki Kurniawan et al., (2020) mengenai pengaruh zakat produktif, manajemen usaha dan pendampingan terhadap perkembangan UMKM di LAZNAZ LMI Blitar dengan pendekatan kuantitatif diperoleh hasil bahwa variabel zakat produktif, manajemen usaha dan pendampingan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel pengembangan usaha.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa modal, pelatihan dan pendampingan usaha tidak terlepas dari tujuan pemerintah melalui program

Desa PRIMA untuk mengembangkan usaha sehingga mampu memberdayakan perempuan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pada dasarnya perkembangan usaha dapat melalui berbagai cara, bukan hanya dari faktor modal, pelatihan dan pendampingan usaha. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, muncul rasa ingin tahu dan ketertarikan peneliti untuk mengetahui kevalidan dugaan sejauh mana modal usaha, pelatihan dan pendampingan berpengaruh terhadap perkembangan usaha program Desa PRIMA. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROGRAM DESA PRIMA DI KABUPATEN KULON PROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh modal usaha terhadap perkembangan UMKM program Desa PRIMA di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana pengaruh pelatihan usaha terhadap perkembangan UMKM program Desa PRIMA di Kabupaten Kulon Progo?
3. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap perkembangan UMKM program Desa PRIMA di Kabupaten Kulon Progo?
4. Bagaimana pengaruh modal usaha, pelatihan dan pendampingan usaha berpengaruh terhadap perkembangan UMKM program Desa PRIMA di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap perkembangan UMKM program Desa PRIMA di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan usaha terhadap perkembangan UMKM program Desa PRIMA di Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan usaha terhadap perkembangan UMKM program Desa PRIMA di Kabupaten Kulon Progo.
4. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha, pelatihan dan pendampingan usaha terhadap perkembangan UMKM program Desa PRIMA di Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi:

- a. Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk menunjang penelitian pada bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terutama pada pengaruh modal usaha, pelatihan dan pendampingan maupun sebagai bahan menambah informasi dalam mengelola usaha.

- b. Penelitian Lanjut

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang lebih lanjut yang berhubungan dengan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

c. Penulis

Penelitian ini dapat menjadikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai berbagai hal yang terkait dengan penelitian serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama ini.

2. Bagi Praktisi

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan ataupun informasi tambahan kepada pelaku usaha mengenai potensi dan peluang serta sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah dalam menghadapi permasalahan dan perkembangan usahanya sehingga tercipta kebermanfaatan baik pada wilayah terkait maupun bangsa Indonesia.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berwenang dalam penetapan kebijakan maupun pengambilan keputusan khususnya bagi instansi yang memiliki keterkaitan dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.